

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran umum Desa Tapak Rejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar**

Tapak Rejo merupakan desa yang terdapat di kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar yang letaknya di bagian timur kabupaten Blitar. Secara keseluruhan, Desa Tapakrejo terbagi menjadi 4 dusun, yaitu: Tapakkrajan, Mangkurejo, Sumbermangku, dan Bumiayu, tetapi disini untuk dusun Bumiayu menjadi satu kesatuan dengan Sumbermangku karena letaknya tersendiri dan dikelilingi oleh Desa Bumirejo

Keadaan geografis adalah suatu gambaran nyata dari lingkungan sekitar maupun hasil antara aaptasi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Keadaan geografis meliputi batas-batas wilayah letak administratif dan keadaan iklim. Adapun batas-batas wilayah desa Tapak Rejo kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sebagai berikut.<sup>43</sup>

1. Sebelah Utara : Desa Bumi Rejo Kecamatan Kesamben  
Kabupaten Blitar
2. Sebelah Selatan : Desa Tepas Kecamatan Kesamben Kabupaten  
Blitar
3. Sebelah Barat : Desa Kemirigede Kecamatan Kesamben  
Kabupaten Blitar

---

<sup>43</sup> Buku Profil Desa Tapak Rejo kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar(Tahun 2019),hal.1

4. Sebelah Timur : Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben  
Kabupaten Blitar

Desa Tapak Rejo merupakan salah satu dari 9 desa di kecamatan Kesamben yang memiliki luas wilayah 404 Ha. Sebagaimana iklim di Indonesia, Desa Tapak Rejo mempunyai iklim yang sama yaitu penghujan dan kemarau. Jarak Desa Tapak Rejo ke pusat pemerintahan kecamatan sejauh 5km, sedangkan jarak ke pemerintah kabupaten sejauh 40km.

Jumlah penduduk yang berada di Desa Tapak Rejo kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sebagian besar adalah laki-laki dengan jumlah sebesar 1775 (jiwa) sedangkan penduduk perempuan berjumlah 1734 (jiwa).<sup>44</sup> Masyarakat Desa Tapak Rejo sama halnya dengan masyarakat di desa-desa lain yang tidak terlepas dari ajaran agama. Masyarakat di Desa Tapak Rejo mayoritas beragama Islam.

Pendidikan adalah salah satu yang mendasar bagi perkembangan kehidupan manusia untuk kearah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Berdasarkan jumlah pendidik yang ada di Desa Tapak Rejo kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, baik yang belum sekolah tamatan sekolah dasar, tamatan sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

**Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tapak Rejo**

---

<sup>44</sup> Buku Profil Desa Tapak Rejo kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar (Tahun 2019), hal. 9

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 1

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pra Sekolah	60 jiwa
2.	SD (Sekolah Dasar)	1.168 jiwa
3.	SMP (Sekolah Menengah Pertama)	754 jiwa
4.	SMA (Sekolah Menengah Atas)	603 jiwa
5.	Perguruan Tinggi	32 jiwa

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tapak Rejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar yang mengenyam pendidikan hanyalah sebagian saja. Jika dilihat dari pekerjaannya, masyarakat Desa Tapak Rejo memiliki beragam pekerjaan. Mulai dari petani, buruh, pedagang, pegawai negeri sipil dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:<sup>46</sup>

**Tabel 4.2 Jenis-jenis Mata Pencarian Penduduk Desa Tapak Rejo**

No.	Mata Pencarian	Jumlah
1.	PNS/Polisi/TNI	20 jiwa
2.	Pegawai Swasta	43 jiwa

---

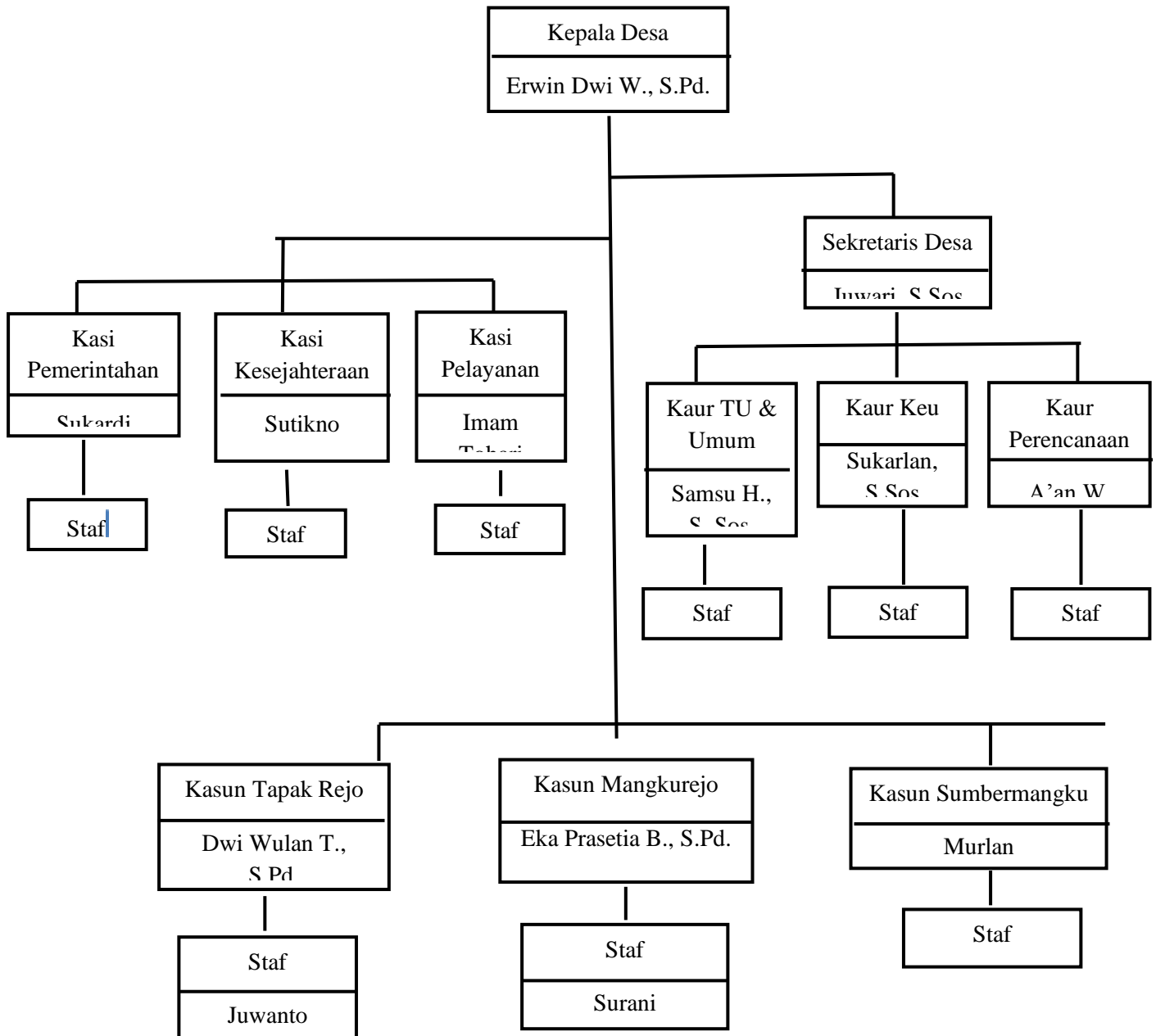
<sup>46</sup> Buku Profil Desa Tapak Rejo kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar (Tahun 2019), hal. 1-7

3.	Pedagang	161 jiwa
4.	Buruh	79 jiwa
5.	Petani	574 jiwa
6.	Lainnya	224 jiwa

*Sumber: Dokumen Kantor Desa Tapak Rejo Tahun 2019*

Dalam sebuah desa di butuhkan pemerintah untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan Desa. Struktur pemerintah desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatanya memiliki porsinya tersendiri. Cara kerja suatu pemerintahan dapat di analisa melalui sturkturnya yang tergambar dan akan bisa di ketahui bagian dan sub bagian, wewenang masing-masing bidan serta hubungan koordinasi antar bagian sub bagian dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing-masing yang akhirnya menggambarkan saling ketergantungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Struktur pemerintahan Desa Tapak Rejo adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Struktur Pemerintahan Desa Tapak Rejo**



*Sumber: Dokumen Kantor Desa Tapak Rejo Tahun 2019*

## 2. Paparan Data Penelitian

Paparan data peneliti di peroleh dari lapangan adalah data hasil observasi dan interview atau wawancara. Dalam hal ini, peneliti tidak

mengalami kendala yang berarti untuk menggali informasi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, karena proses wawancara ini bersifat santai dan berlangsung dalam kegiatan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas subjek. Hasil peneliti ini didapatkan dari wawancara mendalam dengan narasumber penelitian. Narasumber penelitian dalam narasumber ini terdiri dari perangkat Desa Tapak Rejo, tokoh ulama Desa Tapak Rejo, serta masyarakat Desa Tapak Rejo.

Sebagaimana judul yang diangkat oleh peneliti yaitu “Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) menurut perspektif UU No 14 Tahun 2008 tentang *Website* Desa.” Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Desa. Semua pendapatan dan pengeluaran Desa direncanakan dan tertera dalam dokumen APBDes. Oleh karenanya APBDes berfungsi sebagai patokan atau rel yang mengarahkan perihal bagaimana penerimaan dan belanja Desa berjalan selama satu tahun.

APBDes juga memiliki fungsi penting bagi publik, yaitu menjadi sumber informasi mengenai keuangan Desa. Oleh karenanya Pasal 13 peraturan menteri dalam negeri No. 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa mengatur bahwa informasi APBDes harus disebarluaskan, mulai dari penetapan rencana penyusunan, penyusunan, pembahasan sampai dengan pengundangannya. Penyebaran tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memberi informasi kepada masyarakat, tetapi juga ditunjukkan untuk memperoleh masukan dari mereka.

APBDes di tetapkan dan di gunakan sebagai peraturan Desa. Dengan demikian dokumen Desa termasuk kedalam kategori informasi publik sebagaimana dalam pasal 11 peraturan Komisi Informasi Publik No. 1 Tahun 2010 tentang standart pelayanan informasi publik menyatakan bahwa peraturan badan publik dan laporan keuangan badan publik merupakan informasi yang wajib di sediakan dan di umumkan secara berkala. Selanjutnya mengenai cara penyebaran di jelaskan dalam Pasal 20 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang standart pelayanan publik yang mengatkan badan publik negara (Desa) wajib mengumumkan informasi yang wajib di sediakan dan di umumkan secara berkala melalui situs resmi atau melalui papan nama pengumuman yang mudah di akses oleh masyarakat.

Desa Tapak Rejo memang benar belum mempunyai *Website*, dimana pada saat ini sudah di atur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP). Dalam pasal 7 di jelaskan bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik, badan publik (Desa) harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi serta dapat memanfaatkan media elektronik. Selanjutnya di tegaskan lagi dalam pasal 20 Peraturan Komisi Informasi No1 Tahun 2010 tentang standart informasi pelayanan publik, bahwa badan publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib di sediakan dan di umumkan secara berkala. Sebagaimana yang di tuturkan oleh Bapak Juwari, S.Sos selaku Sekdes Desa Tapak Rejo bahwa :

“Adanya *Website* Desa ini memang sangat penting, karena dengan adanya *Website* dapat membantu jalannya pemerintahan Desa dan juga membantu masyarakat untuk memudahkan mencari informasi. *Website* Desa Tapak Rejo ini memang belum ada mas punyanya Cuma sebatas Blooger yang itupun jarang di gunakan jarang di buat ngakses informasi. Pada saat ini pembuatan *Website* Desa masih di rencanakan Dn nunggu SK dari kepala desa karena baru saja pemilihan kepala Desa.”<sup>47</sup>

Hal ini di benarkan lagi oleh Bapak Sukarlan,S.Sos sebagai kaur keuangan Desa, beliau mengatakan bahwa :

“Untuk *Website* Desa, Desa kami memang belum mempunyai *Website*, namun sudah ada perencanaan untuk mebuat website Desa tinggal nunggu SK dari Bapak Kepala Desa.”<sup>48</sup>

Alasan kenapa Desa Tapak Rejo belum mempunyai *Website* Desa sampai sekarang di jelaskan lagi oleh Mas Aan sebagai Kaur perencanaan, beliau mengatakan :

“Di sini yang menyebabkan kami belum membuat *website* dan adanya hanya *blooger* karena di wilalayah Desa kami sebagian besar masih susah sinyal mas, dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang *website* desa atau kurang *update* nya masyarakat, oleh karena itu pihak desa Tapak Rejo enggan memikirkan *website* desa walaupun itu sangat penting.”<sup>49</sup>

Juga di jelaskan lagi oleh Bapak Sekdes Desa Tapak Rejo beliau mengatakan:

“Keterbatasan sumberdaya manusia dan juga susahnya jaringan internet atau sinyal itu salah satu penyebab mengapa esa kami belum membuat website dan jarang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengakses atau mengetahui Transparansi keuangan desa dan juga untuk mengetahui profil esa. Tetapi desa kami sudah menyiapkan informasi untuk mengetahui APBDes

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Sekdes Desa Tapak Rejo, tanggal 20 febuari 2020 pukul 10.30 WIB

<sup>48</sup> Wawancara dengan Kaur Keuangan Tapak Rejo, tanggal 20 febuari 2020 pukul 10.40 WIB

<sup>49</sup> Wawancara dengan Kaur Perencanaan Tapak Rejo, tanggal 20 febuari 2020 pukul 11.11 WIB



dan lain-lain, yaitu desa kami menyediakan papan nama atau baliho yang sudah kita pasang di depan kantor adaesa mas.”<sup>50</sup>

*Website* desa juga berpengaruh terhadap pembangunan desa, terkait *controlling* langsung dari pemerintah kabupaten, pemetaan pembanguna bisa di lihat dari *website* desa tersebut, sperti yang di jelaskan oleh Bapak Sekretaris desa di desa Tapak Rejo, beliau mengatakan :

“Memang benar mas, adanya *website* desa bisa memudahkan pemerintah kabupaten untuk mengakses desa kami dan juga untuk mengontrol desa kami. Ya itu tadi mas desa kami masih merencanakan untuk pembuatan Wesite desa dan masih menunggu SK dari Bapak Kades, karena desa kami barusaja melakukan pilkades mas.”<sup>51</sup>

Ketidak tersediaan *Website* desa ini sangatlah penting, kemudahan internet sangatlah membantu untuk menjadikan desa lebih transparans mengenai APBDes. Di jelaskan lagi dalam Pasal 7 No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP), di jelaskan bahwa badan publik (desa) harus membangun dan mengembangkan sistem informasi publik. Selanjutnya di tegaskan lagi dalam pasal 20 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang standart pelayanan publik, bahwa badan publik negara<sup>52</sup> wajib mengumumkan informasi yang wajib di sediakan dan di umumkan secara brkala sekurang kurangnya melalui situs resmi atau Website desa atau pengumuman yang mudah di pahami oleh masyarakat.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Sekdes Desa Tapak Rejo, tanggal 20 febuari 2020 pukul 10.30 WIB

<sup>51</sup> Wawancara dengan Sekdes Desa Tapak Rejo, tanggal 20 febuari 2020 pukul 11.30 WIB

<sup>52</sup> Dalam lampiran 1 Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2010 tentang standart layanan informasi.

Kaur perencanaan desa Tapak Rejo menanggapi beliau mengatakan bahwa tentang isi dari undang-undang tersebut :

“Iya mas kami juga sudah tahu tentang standart pelayanan publik untuk media transparansi, ya itu tadi desa kami masih merencanakan pembuatan Website desa yang masih menunggu SK dari Bapak Kepala desa. Memang desa kami belum bisa menyediakan informasi melewati Website desa untuk media transparansi APBDes tetapi kami sudah berusaha menjadi transparan, kami setidaknya sudah membuat papan nama atau baliho yang ada di depan kantor desa kami untuk mengetahui tentang APBDes dan itupun juga mudah di akses atau di pahami oleh masyarakat. Kalaupun untuk mengetahui tentang profil desa ataupun letak geografis desa bisa langsung saja ke kantor desa bisa menanyakan. Sebenarnya kami sudah membuat *blooger* atau *blog* tapi ya jarang digunakan karena itu tadi mas mayoritas wilayah desa kami masih susah sinyal dan masyarakatpun tidak perduli tentang adanya *blooger* itu tersebut atau kurang memahami apa itu fungsinya.”<sup>53</sup>

Saat bertanya kepada perwakilan ulama desa, yang mana Bapak Imam Tohari beliau mengatakan bahwa :

“Adanya *website* Desa memang sangat membantu mas untuk memudahkan masyarakat desa Tapak Rejo atau ora lain yang pengen mengakses atau melihat profil desa Tapak Rejo melalui media sosial yaitu *website* desa. Saya perwakilan dari tokoh agama dusun Sumbermangu pernah mengusulkan keda pemerintah desa untuk membuat *website* desa. Karena di desa Tapak Rejo mempunyai banyak situs budaya atau peninggalan sejarah yang berupa arca-arca ataupun punden. Di situ tujuan saya sebagai perwakilan tokoh agama untuk mempromosikan desa Tapak Rejo yang mempunyai peninggalan sejarah atau arca-arca yang di situ tujuan kami supaya mempromosikan desa tapak rejo siapa tahu peninggalan sejarah itu bisa di buat wisata.”<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Kaur Perencanaan Tapak Rejo, tanggal 20 febuari 2020 pukul 11.45 WIB

<sup>54</sup> Wawancara dengan perwakilan tokoh agama Desa Tapak Rejo, tanggal 20 febuari 2020 pukul 13.00 WIB

### 3. Pandangan Ulama terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Syariat islam adalah jembatan dalam merealisasikan masalah. Karena itu, syariat islam tegak di atas dalam menjaga masalah. Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak Imam Tohari, sebagai berikut:

Dalam islam kan ada yang namanya syariat islam ya, syariat islam itu kita pakai sebagai jalan ataupun jembatan kita dalam memecahkan semua permasalahan dari semua segi kehidupan agar terwujudnya suatu kemaslahatan umat. Masalah itu sendiri adalah tercapainya tujuan syariah (maqasid syariah). Jadi peran syariat islam sangat penting dalam usaha mewujudkan kemaslahatan umat ini.

Syariat islam memiliki peran penting dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat pada seluruh sendi kehidupan termasuk permasalahan mengenai hak penyandang disabilitas. Dalam islam terdapat ilmu fikih siyasah yang mengatur hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Bapak Imam Tohari, sebagai berikut:

Fikih siyasah biasa disebut dengan politik syariat tapi bukan politik yang biasa di gunakan pada saat ini, politik yang menghalalkan segala cara, saling sikut menyikut. Siyasah disini adalah suatu pemerintahan untuk mewujudkan suatu kebaikan dan kemaslahatan bagi umat.

Di jaman yang modern sekarang ini, pengaplikasian atau penggunaan media sosial sebagai sarana berkomunikasi dengan cepat dianggap sangat efektif, praktis dan efisien. Hal itu karena nyaris setiap orang memiliki smartphone pribadi, sehingga apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait pelayanan yang mereka inginkan bisa dengan mudah dilakukan

lewat *smartphone* yang mereka miliki. Begitu juga dengan kantor pemerintahan, penyediaan seperti *website* atau situs resmi yang dimiliki oleh kantor pemerintahan tersebut guna memenuhi segala pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih mudah menjangkau bila berkepentingan dengan kantor pemerintahan dirasa sangat efektif demi terwujudnya suatu pemerintahan yang bisa dikatakan modern dan melekatkan teknologi. Kemudahan berkat disediakannya *website* oleh desa juga dibenarkan oleh Bapak Imam Tohari, berikut adalah pemaparan beliau:

“Adanya *website* Desa memang sangat membantu mas untuk memudahkan masyarakat desa Tapak Rejo atau ora lain yang pengen mengakses atau melihat profil desa Tapak Rejo melalui media sosial yaitu *website* desa. Saya perwakilan dari tokoh agama dusun Sumbermangu pernah mengusulkan keda pemerintah desa untuk membuat *website* desa. Karena di desa Tapak Rejo mempunyai banyak situs budaya atau peninggalan sejarah yang berupa arca-arca ataupun punden. Di situ tujuan saya sebagai perwakilan tokoh agama untuk mempromosikan desa Tapak Rejo yang mempunyai peninggalan sejarah atau arca-arca yang di situ tujuan kami supaya mempromosikan desa tapak rejo siapa tahu peninggalan sejarah itu bisa di buat wisata.

Dengan adanya fasilitas yang modern juga akan berdampak positif juga bagi Desa Tapak Rejo. Salah satunya adalah bisa menunjang kemajuan Desa Tapak Rejo, sehingga meskipun berada jauh dari pusat kota namun soal kemajuan yang dimiliki Kantor pemerintahan Desa Tapak Rejo yakni *website* guna untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik ini dirasa sangat baik. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi semua elemen yang ada di Desa Tapak Rejo tersebut, selain para perangkat desa akan dimudahkan dengan hanya kecanggihan teknologi sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih cepay dan efisien, juga masyarakat

diuntungkan dengan transparansi tentang segala apapun pengaturan serta informasi yang ditujukan kepada masyarakat dari pihak pemerintahan desa, sehingga kedepannya Desa Tapak Rejo bisa menjadi salah satu desa yang modern serta dapat menjadi contoh desa yang maju bagi desa-desa disekitarnya.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di tinjau dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Fiqih Siyasah**

Untuk mewujudkan suatu desa yang *modern* dan transparan dalam pelaksanaan pemerintahan, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu sarana yang dapat menunjang transparansi pemerintahan desa terutama mengenai APBDes maka *website* desa merupakan salah satu solusi terbaik, mengingat dengan menggunakan *website* pemerintah desa dapat dengan mudah mengirim laporan keuangan desa yang sudah digunakan untuk pembangunan desa maupun kegiatan desa. Namun ternyata di Desa Tapak Rejo masih belum memiliki *website* yang dapat diakses oleh seluruh orang terutama masyarakat Tapak Rejo itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan judul yang peneliti pilih, yaitu :

- a. Surat Keputusan Kepala Desa untuk pembuatan *website* Desa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dilapangan, dapat diperoleh keterangan bahwa tidak adanya *website* di Desa Tapak Rejo ini karena masih menunggu SK dari Kepala Desa untuk pembuatan *website*. Dikarenakan Kepala Desa baru dilantik maka masih harus menata ulang pemerintahan desa supaya lebih teratur dan terencana segala program yang akan dijalankan, tidak terkecuali mengenai rencana pembuatan *website* desa untuk sarana transparasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan khususnya mengenai anggaran (APBDes). Mengingat bahwa APBDes yang dititipkan kepada pemerintahan desa saat ini nominalnya cukup besar, untuk menghindari kecurigaan masyarakat maka sarana untuk memperlihatkan program yang melibatkan APBDes harus diperbarui. Apabila dengan menggunakan *website* pemerintah desa lebih mudah untuk mengunggah dana yang diterima untuk apa saja, karena apabila selama ini dilakukan dengan menggunakan *banner* yang di pasang di setiap sudut desa dirasa kurang efektif dan malah menghambur-hamburkan anggaran.

b. Pengetahuan perangkat desa mengenai pembuatan *website*.

Perangkat Desa merupakan wakil dari masyarakat yang dianggap pantas untuk menjadi perwakilan agar dapat membangun desa menjadi lebih maju dan terarah. Namun pada kenyataannya perangkat desa di Tapak Rejo masih sangat awam untuk membuat sebuah *website*. Kurangnya pengetahuan perangkat desa ini menjadi faktor yang mempengaruhi tidak adanya *website* desa selama ini. Perlu adanya

perangkat tambahan yang khusus mengatur atau mengurus masalah IT (*Information Technology*), dengan adanya perangkat yang khusus menangani masalah IT tersebut akan sangat membantu pemerintah desa Tapak Rejo dalam melaksanakan pemerintahan desa mengingat pada saat ini segala sesuatu nya diakses menggunakan internet.

c. Pentingnya *website* Desa sebagai sarana transparasi pemerintahan Desa.

Pemerintah desa Tapak Rejo dan masyarakat desa tapak rejo kurang memahami arti penting *website* untuk mendukung program pemerintahan desa. Dikarenakan di daerah Tapak Rejo sendiri masih susah jaringan untuk mengakses internet, maka pemerintah desa serta masyarakat menjadi mengesampingkan peran *website* desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa di era digital saat ini. Apabila pemerintah desa memulai untuk membuka *website* dan mengedukasi masyarakat desa Tapak Rejo, maka era digital di desa Tapak Rejo dapat dimulai dengan mudah. Kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat sangat penting untuk dilakukan, melihat di desa Tapak Rejo juga memiliki beberapa organisasi kemasyarakatan yang dapat membantu atau sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan atau mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya *website* desa untuk mendukung transparasi pemerintahan khususnya mengenai APBDes. Maka perlu dilakukan edukasi mengenai pentingnya *website* desa sebagai sarana transparasi pemerintahan desa di desa Tapak Rejo.

## **2. Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam Prespektif Fiqih Siyasah**

Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) menurut pandangan hukum islam khususnya fikih siyasah kurang sesuai dengan konsep dari fikih siyasah, sebab pemerintah dirasa belum melakukan suatu tindakan kemaslahatan umat dan belum sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 tentang kewajiban menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional, buktinya Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) menggunakan *website* Desa dirasa belum begitu transparan sebab terkendalanya fasilitas yang dirasa kurang dalam menunjang usaha pemerintah untuk saling terbuka kepada masyarakat tetang informasi desa khususnya anggaran pendapatan belanja desa.